

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Utama, Departemen Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710

Tel: (021) 351-1178 Fax: (021) 351-1186 Website: <http://www.ekon.go.id>

SIARAN PERS

EVALUASI EKONOMI 2008 DAN PROSPEK 2009 OLEH PEMERINTAH RI

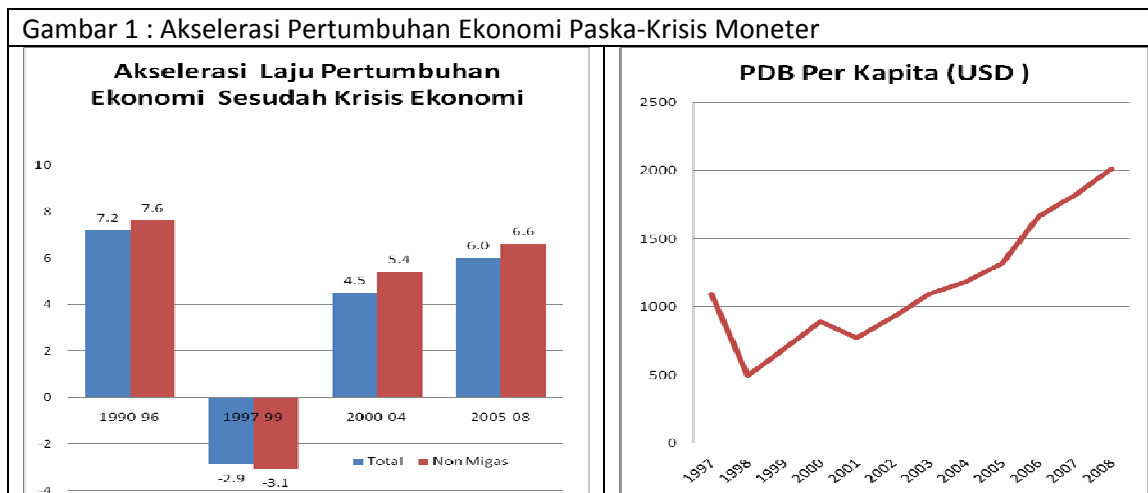
Jakarta, 5 Januari 2009 – Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan dia cukup optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 dapat mencapai 5%. Hal itu disampaikan pada dialog “EVALUASI EKONOMI 2008 DAN PROSPEK 2009” dengan para editor media massa dan pakar ekonomi di kantornya hari ini. Pada pertemuan itu, Menko Sri Mulyani didampingi oleh 8 menteri di bidang ekonomi.

Dalam penjelasannya Menko Sri Mulyani mengatakan: “Sekalipun harus menghadapi dampak krisis keuangan global, perekonomian Indonesia tahun 2009 akan dapat tumbuh dengan 5%. Hal itu berdasarkan evaluasi kinerja perekonomian Indonesia selama 5 tahun terakhir dan realisasi APBN tahun 2008 yang baru saja lewat. Defisit APBN 2008 yang hanya mencapai 0,1% dari PDB, jauh lebih rendah dari rencana semula sebesar 2,1% dari PDB, memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi Pemerintah melaksanakan program-program mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBN 2008 sebesar Rp 51,3 triliun merupakan *blessing in disguised* di tengah-tengah krisis global saat ini, karena Pemerintah dapat menggunakan sebagian dari jumlah itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah kelesuan global.”

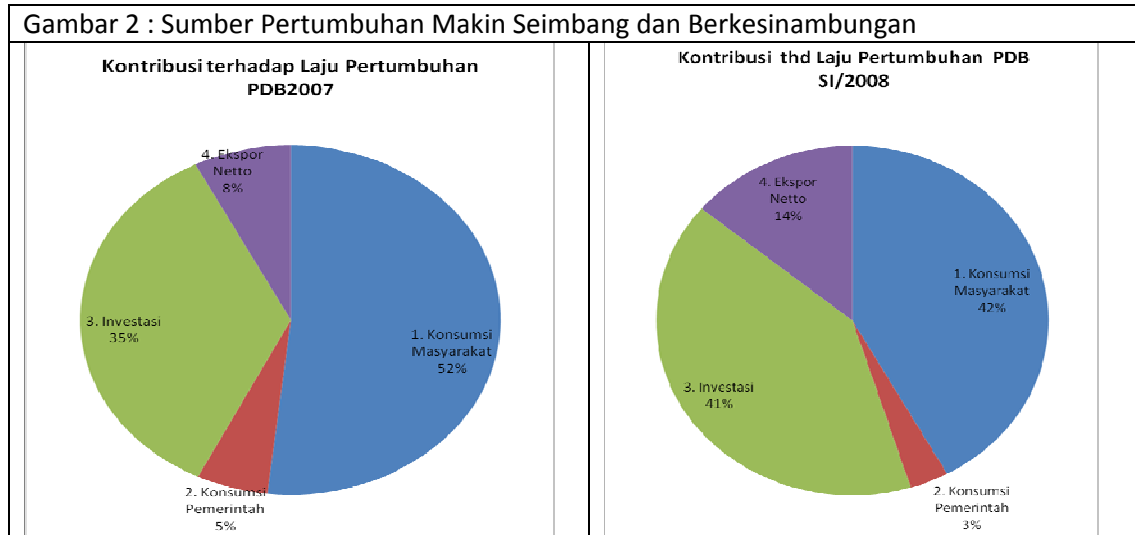
A. Pertumbuhan ekonomi 2005-2008 menjadi dasar pertumbuhan tahun 2009

Pada bagian lain dari penjelasannya, Menko Sri Mulyani menjelaskan kemajuan-kemajuan dalam bidang perekonomian yang dapat dilihat dari tiga indikator utama perekonomian:

- *Akselerasi pertumbuhan ekonomi.* Perkembangan pertumbuhan ekonomi sejak krisis moneter tahun 1997/98 (Gambar 1) mengalami percepatan terutama dalam periode 2004-2008. Akselerasi ini didukung pula dengan makin seimbangny sumber pertumbuhan ekonomi dimana investasi makin



penting perannya, sementara konsumsi masyarakat tetap terjaga tinggi tingkat pertumbuhannya (Gambar 2). Dengan keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi makro (nilai tukar dan inflasi), pendapatan per kapita Indonesia jika diukur dalam mata uang USD, meningkat 1,8 kalipada akhir 2008 dibandingkan akhir 2004 dan melebihi USD 2.000 per kapita pada akhir 2008.



- **Penurunan Kemiskinan.** Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas harga pokok telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada periode 2005-2006. Data Susenas terakhir Maret 2008, menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai titik terendah. Penurunan ini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Tabel 1 : Pengurangan Kemiskinan

Perkembangan Kemiskinan dengan Berbagai Ukuran

	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
BPS												
Jumlah**	34.1	49.5	47.97	38.7	37.9	38.4	37.3	36.1	35.1	39.3	37.2	35.0
Persentase	17.5	24.2	19.1	18.4	18.2	17.4	17.4	16.7	16.0	17.8	16.6	15.4
Garis Kemiskinan USD PPP 1 per kapita/hari (Bank Dunia)												
Jumlah	15.4	na	24.9	20.9	19.7	15.5	14.5	16.5	13.6	19.5	15.5	14.2*
Persen	7.8	na	12.0	9.9	9.2	7.2	6.6	7.4	6.0	8.5	6.7	5.9*
Garis Kemiskinan USD PPP 2 per kapita/hari (Bank Dunia)												
Jumlah	99.6	na	135	125.3	125.2	115.6	110	109.1	102.1	113.8	105.3	100.7*
Persen	50.5	na	65.1	59.5	58.7	53.5	50.1	49	45.2	49.6	45.2	42.6*

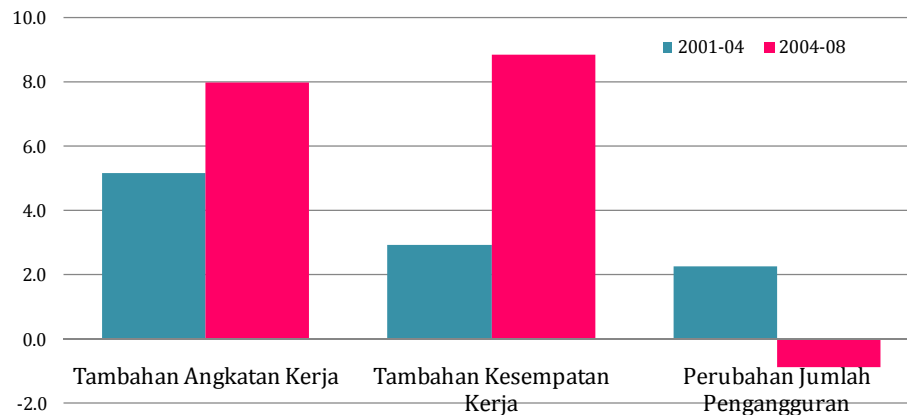
*) proyeksi

**) Jumlah Orang Miskin (dalam juta)

Sumber: BPS dan Bank Dunia

- **Penurunan tingkat Pengangguran.** Sejak krisis ekonomi 1998 sampai dengan 2005, jumlah penganggur mengalami kenaikan secara nominal dan persentase terhadap angkatan kerja. Namun sejak tahun 2006, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan *net employment* yang positif, sehingga menghasilkan tingkat pengangguran yang menurun baik secara absolut maupun secara persentase terhadap angkatan kerja. Ekspansi lapangan kerja ini didukung oleh penciptaan lapangan kerja di sektor formal.

Gambar 3 : Tambahan Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Perubahan Jumlah Pengangguran (juta orang)



TANTANGAN KE DEPAN

Sekalipun demikian, Menko Sri Mulyani menyadari bahwa pencapaian di atas masih berada dibawah harapan masyarakat dan sasaran pemerintah sendiri yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2004-2009. Tingginya harapan masyarakat tersebut bisa dimengerti karena capaian kinerja *ekonomi selama* 30 tahun hampir lenyap ditelan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Krisis ekonomi pada 10 tahun silam telah meninggalkan trauma yang cukup dalam, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Walaupun demikian, berbagai kebijakan ekonomi yang tidak populer, seperti kebijakan penyesuaian harga BBM tahun 2005 dan awal tahun 2008 berhasil digulirkan. Kebijakan ini ternyata berhasil menstabilkan dan menggerakkan kembali perekonomian.

Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dekade mendatang mengingat beberapa hal. *Pertama*, perubahan dalam teknologi telah menurunkan elastisitas penciptaan lapangan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi. Artinya jika kita ingin menurunkan tingkat pengangguran menuju sekitar 4-5%, maka dalam dekade mendatang sektor non migas Indonesia harus selalu mampu tumbuh di atas 7%. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia dan memaksa banyak negara melakukan reorientasi strategi pembangunan ekonominya. *Kedua*, Tingkat kemiskinan Indonesia juga masih tergolong tinggi. Sebagian besar keluarga Indonesia masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Laju pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa dekade mendatang akan kita butuhkan bukan hanya untuk mengentaskan kemiskinan absolut (dewasa ini sekitar 6%) namun juga untuk mengurangi penduduk yang tergolong nyaris miskin (*near poor*) yang jumlahnya hampir separuh rakyat Indonesia. Kelompok rumah tangga yang nyaris miskin ini tergolong rentan terhadap gejolak baik yang sifatnya individual maupun global atau sistemik. Penguatan kelompok ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian domestik dan proses transisi demokrasi mengingat kelompok ini merupakan bagian penting dari kelas menengah. Kita juga perlu mengembalikan kinerja sektor penghasil barang (*tradables*) yang tertinggal dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir. Pertumbuhan sektor *tradables* yang cepat, sangat dibutuhkan untuk membiayai investasi dan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri di masa mendatang.

PERBANDINGAN PERTUMBUHAN BEBERAPA NEGARA ASIA

Dilihat dari perspektif regional, perkembangan Indonesia cukup baik. Tabel 2 menunjukkan perkembangan beberapa indikator ekonomi di beberapa negara Asia sejak krisis ekonomi tahun 1998. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah salah-satu yang terbaik di Asia khususnya dalam periode 2005-08. Risiko ekonomi makro juga makin terkendali. Tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah mengendalikan inflasi ke tingkat yang sama dengan negara-negara di kawasan.

Tabel 2

Kemajuan Ekonomi Setelah krisis Ekonomi 1997/98 Negara Asia (% atau % thd PDB untuk Utang LN)									
	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Inflasi		Utang Luar Negeri		Tk. Pengangguran	
	1998-04	2005-07	2008	1998	2008	2002	2008	2000	2008
Indonesia	1.5	5.8	6.2	58.4	11.0	64.9	30.7	8.3	8.3
Thailand	5.0	5.0	4.5	8.1	3.0	48.8	29.9	2.4	1.4
Malaysia	5.6	6.0	5.7	5.2	4.3	48.4	31.3	3.5	3.3
Filipina	5.9	4.8	2.7	9.3	4.5	69.8	45.4	11.2	7.3
Korea Selatan	6.1	5.0	4.1	7.7	3.0	25.8	39.4	4.4	3.5
Sumber: IMF, International Financial Statistics									

Perkembangan baik ini telah memulihkan kepercayaan dunia kepada pemerintah. Laporan Growth Commission yang dipimpin oleh salah satu pemegang Nobel, Profesor Michael Spence dan beranggotakan pelbagai prominent persons dari seluruh dunia telah mengidentifikasi Indonesia sebagai salah-satu dari 15 negara dunia yang mampu mempertahankan laju pertumbuhan tinggi di masa lalu dan mempunyai potensi melaju lebih cepat di masa mendatang. Bersamaan dengan hal itu, tahun 2008 Indonesia bersama lima negara lain yaitu China, India, Afrika Selatan dan Brazil diundang untuk menjadi *Enhanced Engagement Countries* klub negara-negara maju (OECD). Sebagai tahap awal Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh Development Centre OECD.

B. Prospek tahun 2009

Kondisi ekonomi global yang tertekan dan penuh ketidakpastian menyebabkan prakiraan keadaan ekonomi khususnya dalam jangka pendek menjadi jauh lebih sukar. Namun tabel 3 menunjukkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional dan bank investasi tidak jauh berbeda dengan perkiraan pemerintah terkini yaitu antara 4,5%-5,5% sepanjang tahun 2009.

Tabel 3 : Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Lembaga	2008	2009
ADB	6.0	4.4
World Bank	6.0	4.5
IMF	6.0	4.5.
Economist	6.0	3.3
Deutsche Bank	6.0	4.5
Danamon	6.2	5.0
Danareksa Investasi	6.2	5.8
Bank Indonesia	6.2	4.9
Pemerintah	6.2	4.5 - 5.5

Berdasarkan asumsi dan argumentasi di atas serta *policy responses* yang dilakukan pemerintah sejak pertengahan 2008 dan sepanjang 2009 mendatang, Pemerintah cukup optimis, ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,5%-5,5% dalam tahun 2009 dengan *base case* 5% dan diharapkan kembali ke kisaran 5,5-6% pada tahun 2010.

Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dapat dilihat pada Tabel 4. Konsumsi masyarakat dan investasi akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2009. Pemerintah memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi selama semester I/2009 dan bertahap pulih kembali memasuki semester II/2009. Pola pertumbuhan ini sesuai dengan perkiraan siklus global dan pola pengeluaran pemerintah. Untuk Indonesia, tahun 2009 adalah tahun pemilu. Kegiatan kampanye partai akan mencapai puncaknya pada akhir triwulan I dan awal triwulan II. Kegiatan ini kemudian akan diikuti dengan Pemilu Presiden. Siklus pemilu ini akan menambah permintaan dan kegiatan ekonomi.

**Tabel 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi
berdasarkan sisi permintaan 2001-2009 (%/tahun)**

	2001-04	2005-2008	2008	2009
Permintaan Domestik	5.1	5.7	7.7	5.7
- Konsumsi Masyarakat	4.2	4.5	5.4	4.8
- Konsumsi Pemerintah	8.9	8.0	10.7	10.4
- Investasi	6.5	8.0	12.6	6.5
- Ekspor	5.9	10.4	13.7	5.9
- Impor	7.2	10.5	13.6	6.1
PDB	4.8	6.0	6.2	5.0

Sumber: Diolah dari data BPS dan Estimasi Kemenko Perekonomian

Secara sektoral, diperkirakan hanya beberapa sektor saja yang memiliki kandungan ekspor dan ketergantungan impor yang tinggi. Secara teoritis dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang moderat, kebijakan fiskal menjadi efektif. Beberapa sektor tradable pun diperkirakan akan menurun tetapi tidak sebesar yang dicemaskan banyak pihak. Misalnya batubara. Pesanan untuk perusahaan besar sudah penuh hingga tahun 2011, belum termasuk tambahan yang akan digunakan oleh PLN berkaitan dengan selesainya secara bertahap proyek-proyek listrik 10 ribu MW. Serupa pula dengan industri tekstil dan pakaian jadi, siklus pemilu diperkirakan akan dapat mengkompensasi penurunan permintaan dari pasar global walaupun dengan margin yang lebih rendah.

Siklus pemilu juga akan menahan penurunan dalam permintaan pada sektor tersier seperti perdagangan, hotel, restoran, transportasi dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut diperkirakan akan melamban pertumbuhannya tetapi tidak stagnan. Dengan demikian diperkirakan dampak pemutusan hubungan kerja akan relatif moderat dibandingkan yang dialami oleh negara lain.

Prospek pertanian tahun 2009 diperkirakan masih akan baik, walaupun akan sedikit di bawah 2008. Kegiatan usaha pertanian yang lebih mengandalkan pasar domestik seperti tanaman pangan dan peternakan bahkan akan tumbuh lebih tinggi atau sama dengan rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir. Tanaman pangan diperkirakan akan tumbuh 4,0%-4,5% dan peternakan akan tumbuh 1,7%-2,1%. Tekanan pertumbuhan akan lebih dirasakan pada sektor perkebunan dan perikanan.

C. Kebijakan Penanggulangan Dampak Negatif Krisis dan Mempersiapkan Fondasi Jangka Menengah

Berkaitan dengan antisipasi dampak krisis keuangan global, Menko Sri Mulyani menjelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan respon yang cepat bukan hanya untuk meredam dampak krisis global, tetapi juga mempersiapkan fondasi yang lebih kuat untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah. Oleh karena itu kebijakan pemerintah tahun 2008 dan 2009 bukan hanya sekedar mengatasi masalah jangka pendek tetapi juga bertujuan meletakkan dasar-dasar yang lebih kuat dan memperkuat sendi-sendi perekonomian nasional.

Kebijakan Utama dalam merespon krisis terletak pada elemen-elemen penting antara lain memperkuat ketahanan sektor finansial, konsolidasi fiskal, stimulus untuk pembangunan sektor riil dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

SEKTOR FINANSIAL

Untuk meningkatkan daya tahan sektor finansial menghadapi krisis global, maka menyusul serangkaian langkah yang telah dilaksanakan pada tahun 2008, Pemerintah akan terus memprioritaskan upaya menjaga stabilitas keuangan disamping melanjutkan kebijakan reformasi sektor keuangan. Langkah memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan akan dituntaskan antara lain dengan:

- Menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dengan ditolaknya Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) oleh DPR;
- Menyelesaikan penyusunan Protokol Manajemen Krisis Keuangan dan memulai penerapannya.

Sementara itu reformasi sektor keuangan akan terus didorong antara lain melalui :

- Peningkatan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi
- Penguatan perusahaan modal ventura
- Penguatan pengawasan dana pensiun dan perusahaan pembiayaan
- Pengembangan perusahaan penjaminan kredit termasuk penjaminan untuk Usaha Kecil Menengah
- Pengembangan perdagangan produk syariah di pasar modal

KONSOLIDASI FISKAL

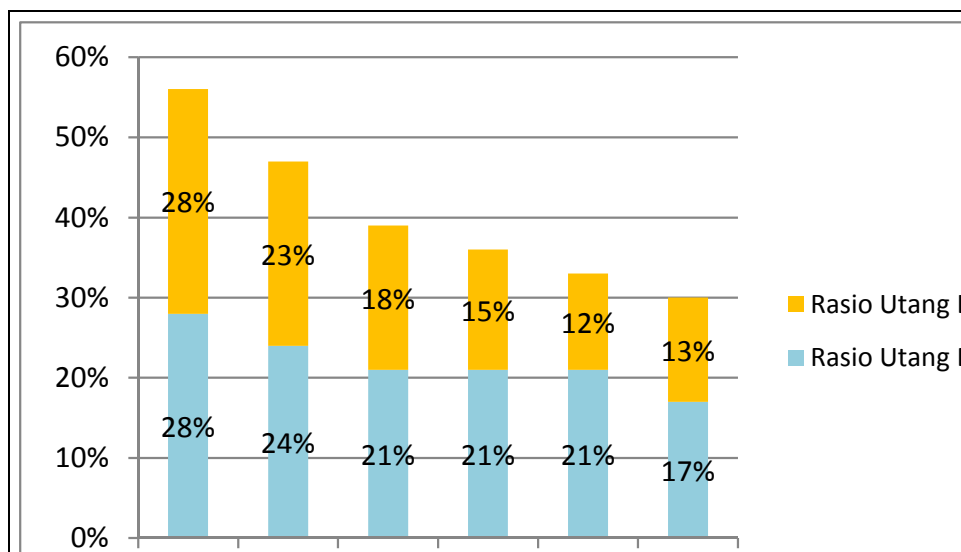
Konsolidasi fiskal yang dilakukan sepanjang periode 1999-2007, telah membuahkan hasil yang memadai bukan hanya untuk memperkuat keberlangsungan fiskal tetapi juga tersedianya *fiscal space* yang memadai untuk mendorong perekonomian domestik. Inti dari konsolidasi fiskal terletak dari perbaikan struktur penerimaan negara, meningkatnya efektivitas pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah maupun terkendalinya risiko fiskal terutama menyangkut sisi pembiayaan defisit anggaran.

Realisasi APBN 2008 menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan dari proses konsolidasi fiskal ini. *Pertama*, dari sisi penerimaan. Struktur penerimaan makin sehat dengan meningkatnya peran penerimaan non migas khususnya pajak penghasilan. Jumlah penduduk yang memiliki NPWP telah melebihi 10 juta pada tahun 2008. Dengan kebijakan sunset policy yang akan diperpanjang hingga Februari 2009 ini, akan semakin meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki NPWP. Kebijakan ini bukan hanya diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara tetapi mengurangi risiko fluktuasi penerimaan pajak dengan meluasnya basis pajak. Dewasa ini penerimaan pajak sangat tergantung pada

sedikit pembayar pajak saja. Misalnya pada tahun 2007 sebesar 56% penerimaan pajak penghasilan perorangan disumbangkan oleh hanya 1% pembayar pajak.

Kedua, trend penerimaan pajak pun makin membaik. Rasio pajak terhadap PDB meningkat dari 12,5% pada tahun 2005 menjadi 14,1% pada tahun 2008. *Ketiga*, dari sisi pengeluaran, efektifitas pengeluaran pemerintah makin mendekati tingkat optimal. Memang masih ada pengeluaran yang tidak bisa direalisasikan. Namun sebagian dari hal tersebut disebabkan oleh sistem pengadaan yang makin baik dengan dilakukan e-procurement yang menghemat pengeluaran hingga 15%. *Keempat*, pengeluaran untuk kebutuhan yang esensial bagi pembangunan terus meningkat termasuk untuk keperluan pendidikan dan kesehatan maupun untuk kebutuhan infrastruktur. Tantangan yang ada adalah bagaimana membuat agar peningkatan pengeluaran ini juga terefleksikan dalam perbaikan kualitas baik dalam stok maupun perbaikan proses pelayanan publik.

Gambar 4 : Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB



Kelima, konsolidasi ini berujung pada perbaikan risiko ekonomi makro Indonesia. Gambar 4 menunjukkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang terus menurun. Penurunan risiko ini juga lebih baik dibandingkan dengan trend yang berlaku di negara Asia lainnya. Dengan demikian, diharapkan proses konsolidasi fiskal ini bisa menjadi motor untuk mempercepat perbaikan peringkat Indonesia menjadi *investment grade* dalam 2 tahun mendatang.

STIMULUS UNTUK PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL

Untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, Pemerintah telah mengalokasikan stimulus pajak untuk pangan, pertanian, dan industri manufaktur antara lain dalam bentuk pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 17 industri. Selain itu juga disediakan juga fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) untuk 9 industri. Alokasi dari dua stimulus yang telah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan itu hampir mencapai Rp 12 triliun.

Tabel 5 : KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (PPN DTP)

NO	INDUSTRI	PPNDTP (juta Rp)	
		IMPOR	DALAM NEGERI
1	Bahan Baku Baja		1,200,000
2	Mesin Peralatan untuk EPC Pembangunan PLTU 10.000 MW		720,000
3	Mesin mini pembuat es untuk perikanan		500,000
4	Mesin gudang pendingin untuk perikanan		250,000
5	Kain untuk industri Pakaian Jadi		1,000,000
6	Kulit, Sol, Komponen Karet untuk Industri Alas Kaki		520,000
7	Bahan Baku dan Komponen Kapal	185,625	185,625
8	Bahan Baku untuk Industri Karoseri		218,300
9	Bahan baku perak untuk industri kerajinan/perhiasan		38,544
10	Komponen dan bahan baku untuk Gerbong KA		79,000
11	Bahan baku dan peralatan untuk produksi film	141,500	
12	Crumb rubber		250,000
13	Rotan untuk industri mebel		100,000
14	Pakan Ikan/Udang		150,000
15	Bahan Bakar Nabati Non Subsidi		187,500
16	Minyak Goreng		800,000
17	Migas dan Panas Bumi	2,500,000	
	JUMLAH	2,827,125	6,198,969
	JUMLAH PPN DTP IMPOR DAN PPN DTP DALAM NEGERI	9,026,094	

Tabel 6 : KEBIJAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP)

NO	INDUSTRI	BM-DTP (juta Rp)
1	Ballpoint	25,390
2	Bahan Baku dan Komponen untuk industri Alat Berat	220,560
3	Bahan Baku dan Komponen untuk pembuatan PLTU kapasitas kecil	14,037
4	Bahan Baku Susu (Skim Milk Powder dan Full Cream)	256,680
5	Bahan Penolong Methyltin Mercaptide	1,488
6	Bahan Baku dan Komponen Industri Otomotif	795,200
7	Komponen Elektronika	323,400
8	Telematika (Fiber Optic dan Komponen Telekomunikasi)	70,000
9	Bahan Baku dan Komponen untuk Kapal	226,600
10	Bahan Penolong Industri Sorbitol	1,058
11	Bahan baku dan peralatan untuk produksi film	25,000
12	Listrik	14,000
13	Alat Kesehatan	11,400
14	Pesawat Terbang	416,000
	JUMLAH	2,400,813

Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan PP 62 tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Peraturan Pemerintah ini memberikan beberapa perbaikan terhadap pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal.

Berdasarkan ketentuan PP 62 tahun 2008, terdapat 8 (delapan) bidang usaha baru yang diberikan insentif PPh untuk investasi yaitu :

- Pengembangan Peternakan
- Usaha Pemanfaatan Tanaman IUPHHK-HTI (HTI)
- Pengembangan dan Pemanfaatan Batu Bara Mutu Rendah (*Low Rank Coal*)
- Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
- Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu
- Pengilangan Minyak Bumi (*Oil Refinery*)
- Pembangunan Kilang Mini Gas Bumi (Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi)
- Kelompok Industri Serat Buatan

Sedangkan tambahan bidang usaha tertentu di daerah tertentu meliputi 6 (enam) bidang usaha yaitu :

- Pengembangan Tanaman Pangan
- Pengembangan Budi Daya Hortikultura
- Kelompok Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
- Kelompok Industri Akumulator dan Listrik dan Batu Baterai
- Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal Perahu
- *Transshipment Port*.

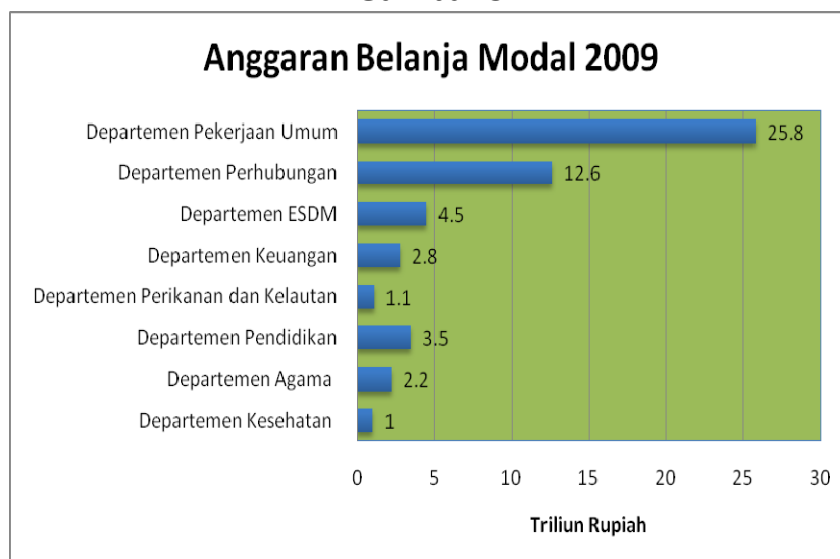
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL

Pengalaman berbagai negara dan landasan teoretis yang ada memperlihatkan pentingnya pemerintah tetap membangun infrastruktur di tengah perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu kementerian dan lembaga yang menangani infrastruktur diharapkan dapat melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi imbas perlambatan ekonomi global pada tahun 2009. Beberapa langkah yang akan diambil untuk proyek-proyek pemerintah diantaranya adalah (1) mempercepat proses pelelangan anggaran 2009 melalui misalnya memulai pengumuman pelelangan pada akhir tahun 2008, dan (2) mempercepat proses pencairan anggaran proyek sehingga para pelaku pasar dapat lebih leluasa dalam mengelola arus kasnya; (3) mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang bersumberkan dana pinjaman luar negeri.

Untuk memperbesar efek penciptaan tenaga kerja, maka pada tahun 2009 pemerintah telah memprogramkan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur senilai tidak kurang dari Rp 72 Triliun di berbagai kementerian dan lembaga sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Demikian pula peranan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan produk dalam negeri. Dalam kaitan dengan hal tersebut, perlu direncanakan pembangunan infrastruktur yang mampu untuk menyerap tenaga kerja yang banyak (pola padat karya) yang tentunya tanpa mengorbankan kualitasnya. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan di lapangan agar kualitas pembangunannya akan tetap terjaga. Demikian pula untuk mendorong industri dalam negeri, maka pemanfaatan teknologi lokal dan bahan baku yang berasal dari dalam negeri perlu digalakkan.

Gambar 5



Pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru, hampir selalu memerlukan pengadaan tanah. Pada saat ini pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur mengalami banyak hambatan. Walaupun pemerintah telah mempunyai perangkat hukum yang relatif lengkap dan telah direvisi beberapa kali untuk mengakomodir prinsip-prinsip keadilan dan menjaga hak setiap warga negara, namun demikian masih ditemukan banyak kendala. Kendala utama yang masih belum ditemukan mekanisme penyelesaian yang efisien dan efektif adalah pada saat tidak terjadinya kesepakatan harga antara pemerintah dengan pemilik tanah. Untuk mengatasi permasalahan harga tanah yang berfluktuasi, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 4,89 Triliun sehingga diharapkan pembangunan jalan tol di pulau Jawa dapat segera terealisasi. Demikian pula pemerintah telah menyediakan dana bergulir untuk pertanahan (*Land Fund*) yang dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk membebaskan tanah.

Di dalam upaya untuk mendorong dan mempercepat pembangunan infrastruktur baik yang didanai melalui APBN maupun yang dikerjasamakan dengan pemerintah, maka berbagai strategi akan ditempuh oleh pemerintah diantaranya mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah yang saat ini sering menjadi momok atas keterlambatan pembangunan infrastruktur terutama di sektor transportasi. Dalam kaitan dengan hal tersebut, berbagai instansi terkait akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam tataran operasional sehingga peraturan yang telah ada selama ini dapat dilakukan secara efisien dan konsisten.

Untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan efisien, efektif, akuntabel, dan transparan harus dimulai dari proses pengadaan yang telah diatur prosedurnya. Pemerintah akan memperluas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang infrastruktur dengan penggunaan Teknologi Informasi, yang dikenal dengan istilah E-Procurement.

Berdasarkan APBN 2009, dana transfer pemerintah Pusat ke Daerah cukup besar baik yang berupa DAK senilai Rp 24.819 Triliun dan Dana Otonomi Khusus senilai Rp 8.856 Triliun. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur. Untuk menjaga agar pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan sarannya, maka pemerintah akan menyiapkan mekanisme pengendalian

terhadap pemanfaatan dana transfer tersebut agar sejalan dengan program pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

D. Proses perumusan kebijakan

Menko Sri Mulyani menjelaskan bahwa selain berbagai program dan alokasi anggaran yang sudah memperoleh persetujuan DPR-RI melalui Undang-undang APBN 2009 seperti yang dijelaskan di atas, maka Pemerintah masih akan memfinalkan program dan alokasi anggaran memanfaatkan sebagian SILPA APBN 2008. Hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai *stakeholders* terkait dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang dilaksanakan akan tepat arah dan efektif.

===***===